RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN ATAS KEPEMILIKAN S-LK
NOMOR : 344.SLK.010-IDN ATAS NAMA PT BERAU COAL

1. IDENTITAS LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-010-IDN
c.	Alamat	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d.	Telepon Email	:	(0541) 747798 trustindoprimakarya@gmail.com
e.	Penanggung Jawab LVLK	:	Ir Kurnia
f.	Standar Audit yang Digunakan	:	- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g.	Auditor	:	Ir Harijadi
h.	Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Berau Coal
b.	Alamat Kantor	:	Jl Pemuda No. 40, Tanjung Redeb - Berau
c.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada APL
d.	Nomor S-LK	:	344.SLK.010-IDN
e.	Ruang Lingkup Sertifikasi	:	IPK Dalam APL atas nama PT Berau Coal Tahun 2018/2019 seluas 2.676,95 Hektar yang terletak di Areal Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Berau Coal di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur No. 503/309/ IPK/DPMPTSP/II/ 2018 Tanggal 14 Februari 2018
f.	Email	:	dedy.kustiono@beraucoal.co.id
g.	Pengurus Perusahaan	:	a. Presiden Komisaris : Gandi Sulistyanto Soeherman b. Komisaris : Laks. TNI (Purn) Dr. Marsetio c. Komisaris : Dr. H. Darmono, S.H, MM d. Presiden Direktur : Ir. Fuganto Widjaya e. Wakil Presiden Direktur : Bambang Heruawan Haliman f. Direktur : Edy Santoso, S.H,M.Hum g. Direktur : Paulus Swasono Satyo Nugroho
h.	*Management Representatif*	:	Farhan Soeprapto

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	8 Oktober 2018 Kantor PT Berau Coal – Tanjung Redeb	Dilaksanakan di Kantor PT Berau Coal dan dihadiri oleh personil seperti BAP dan daftar hadir terlampir. a. Melakukan pertemuan PT Berau Coal didampingi personil terkait dan menyampaikan perkenalan Tim Audit, maksud dan tujuan audit, ruang lingkup audit, uraian rinci kegiatan audit, standar audit yang digunakan, dan komitmen menjaga kerahasiaan. b. Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	8 – 9 Oktober 2018 Kantor PT Berau Coal dan lokasi IPK	a. Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan/uji petik lapangan. b. Melakukan analisis kesesuaian data terverifikasi terhadap prinsip dan kriteria dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sesuai standar VLK sesuai L.2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Pertemuan Penutupan	10 Oktober 2018 Kantor PT Berau Coal – Tanjung Redeb	Dilaksanakan di Kantor PT Berau Coal dan dihadiri oleh personil seperti BAP dan daftar hadir terlampir. a. Menyampaikan laporan hasil audit dan mengkonfirmasikan persetujuannya, meliputi temuan kesesuaian, temuan ketidaksesuaian, jangka waktu pemenuhan tindakan perbaikan, dan observasi. b. Pertemuan Penutupan. dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan Keputusan Penilikan	Samarinda, 20 Oktober 2018	a. PT Berau Coal dinyatakan MEMENUHI prinsip dan kriteria standar VLK sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016. b. Status S-LK : DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya

4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN

A. PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.

KRITERIA 1.1 : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan

1. Indikator 1.1.1 : Pelaku usaha memiliki izin lainnya yang sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	**1.1.1.a** ILS/IPK pada areal pinjam pakai	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh PKP2B PT Berau Coal adalah IPK Pada APL bukan Pada Areal Izin Pinjam Pakai Hutan (IPPKH)
2	**1.1.1.b** Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh PKP2B PT Berau Coal adalah IPK Pada APL bukan Pada Areal Izin Pinjam Pakai Hutan (IPPKH)

KRITERIA 1.2 : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR).

2. Indikator 1.2.1. : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3	**1.2.1.a** Izin HTHR	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh PKP2B PT Berau Coal adalah IPK Pada APL bukan Pada Areal HTHR
4	**1.2.1.b** Peta Lampiran HTHR	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh PKP2B PT Berau Coal adalah IPK Pada APL bukan Pada Areal HTHR

KRITERIA 1.3 : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan

3. Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5	**1.3.1.a** Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh PKP2B PT Berau Coal adalah IPK Pada APL bukan Pada Areal kawasan hutan yang dilepas.
6	**1.3.1.b** Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh PKP2B PT Berau Coal adalah IPK Pada APL bukan Pada Areal kawasan hutan yang dilepas.
7	**1.3.1.c** IPK pada areal yang dilepaskan	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh PKP2B PT Berau Coal adalah IPK Pada APL bukan Pada Areal kawasan hutan yang dilepas.
8	**1.3.1.d** Peta lampiran IPK	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh PKP2B PT Berau Coal adalah IPK Pada APL bukan Pada Areal kawasan hutan yang dilepas.
9	**1.3.1.e** Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh PKP2B PT Berau Coal adalah IPK Pada APL bukan Pada Areal kawasan hutan yang dilepas.

4. Indikator 1.3.2. : IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10	**1.3.2.a** IPK pada areal yang dilepaskan	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh PKP2B PT Berau Coal adalah IPK Pada APL bukan Pada Areal yang dilepas untuk pemukiman transmigrasi
11	**1.3.2.b** Peta Lampiran IPK	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh PKP2B PT Berau Coal adalah IPK Pada APL bukan Pada Areal yang dilepas untuk pemukiman transmigrasi

KRITERIA 1.4 : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)

5. Indikator 1.4.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
12	**1.4.1.a** Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	**M**	Terdapat rencana IPK pada APL (survey potensi) seluas 2.676.95 Ha sesuai Berita Acara Pelaksanaan Timber Crusing Pada Areal Izin Usaha PKP2B PT Berau Coal Kabupaten Berau yang dibuat pada tanggal 29 Januari 2018 oleh Tim Pelaksana TC yang dipimpin Sdr. Satria Yudha Priyanto M.P yang merupakan Ganis PHPL CANHUT dengan Nomor Register : 02364-11/CANHUT/XX/2017 (berlaku s/d tanggal 08 September 2020) Terdapat data Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising yang tertuang di dokumen Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising 100 % pada areal Izin Usaha PKP2B PT Berau Coal seluas 2.676.95 Ha, seperti berikut :

No	Kelompok Jenis	Volume per Kelas Diameter (M3)						Total	
		10 - 29 Cm		30 - 49 Cm		50 Cm Up			
		Btg	Vol.	Btg	Vol.	Btg	Vol.	Btg	Vol.
I	Ky. Indah	469	84.95	351	240.88	88	225.38	908	551.21
II	Meranti	9,390	1,897.86	10,236	8,006.64	5,253	17,762.02	24,879	27,666.52
III	Rimba Campuran	38,313	6,305.12	14,490	9,175.32	2,235	5,950.64	55,038	21,431.08
	Total I+II+III	**48,172**	**8,287.93**	**25,077**	**17,422.84**	**7,576**	**23,938.04**	**80,825**	**49,648.81**

			Terdapat dokumen Pakta Integritas yang dibuat oleh Lincence & Corp. Community Divisi Head PT. Berau Coal tanggal 5 Februari 2018 yang menyatakan bahwa pelaksanaan kegaiatan Timber Cruising 100 % oleh Tim Pelaksana dari tanggal 27 Nopember 2017 s/d 29 Januari 2018 adalah BENAR. Terdapat dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/309/IPK/DPMPTSP/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Izin Pemanfaatan Kayu Pada Areal Penggunaan Lain Tahun 2018/2019 An. PT. Berau Coal Di Areal Pertambangan Batubara (PKP2B) PT. Berau Coal Kabupaten Berau. Terdapat data target produksi kayu bulat diameter 10 cm up sebanyak 80.825 pohon dengan volume 34.754,17 M3 yang merupakan hasil perkalian Rekapitulasi LBC dengan Faktor Eksploitasi (0,7) dan secara rinci target IPK tersebut terdiri dari :

Kelompok Jenis kayu	Target	Kelas Diameter (cm)			
		10-29	30-49	50-Up	Total
Meranti	**N**	9.390	10.236	5.253	24.879
	V	1.328,50	5.604,65	12.433,41	19.366,56
Rimba Campuran	**N**	38.313	14.490	2.235	55.038
	V	4.413,58	6.422,72	4.165,45	15.001,76
Kayu Indah	**N**	469	351	86	886
	V	59,47	168,62	152,97	375,43
Total	**N**	48.172	25.077	7.576	**80.038**
	V	5.801,55	12.195,99	16.756,63	**34.754,17**

Ket. N: Jumlah Pohon ; V : Jumlah Volume (M3)

Sumber data : SK. Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/309/IPK/DPMPTSP/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 yang berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.

13	**1.4.1.b** Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	**M**	Dokumen izin usaha atas nama PKP2B PT Berau Coal yang memperoleh IPK Tahun 2018/2019 seluas 2.676,95 Ha **pada periode penilikan (Maret s/d Oktober 2018)** *tidak ada perubahan* (kecuali akte perusahaan) yaitu sebagai berikut : 1. Terdapat Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dengan PT. Berau Coal yang ditandatangani pada 26 April 1983, dalam akta Agreement between Perusahaan Negara Tambang Batubara and PT. Berau Coal yang diterbitkan oleh Notaris Agus Madjid, SH di Jakarta Selatan yang sudah disetujui Menteri Pertambangan dan Energi pada tanggal yang sama. Perjanjian tersebut telah diamandemen pada tanggal 27 Oktober 1997. Luas wilayah sesuai perjanjian perubahan adalah 121.589,10 Ha.

			2. Terdapat SK Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor: 178.K/40.00/DJG/2005, tanggal 7 April 2005 tentang Penciutan dan Perluasan Wilayah Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam Tahap Kegiatan Produksi PT. Berau Coal : a. Luas Wilayah PKP2B dari 121.589,10 Ha menjadi 118.400 Ha b. Usaha Pertambangan PT. Berau Coal dalam Tahap Kegiatan Produksi. c. Terdapat koordinat titik-titik batas wilayah disertai peta wilayah. 3. Terdapat SKTTL (Surat Penetapan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan) Tahun 2016 dari Dirjen Minerba Cq. Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral; 4. Terdapat Dokumen ANDAL yang telah disetujui oleh Komisi Amdal Pusat Departemen Pertambangan dan Energi Nomor 527/28/SJN.T/2000 tanggal 14 Februari 2000; 5. Terdapat SK Bupati Berau Nomor 502 Tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013. Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Atas Rencana Peningkatan Produksi Batu Bara dari 5 Juta MT/tahun menjadi 17 Juta MT/tahun SK Bupati Nunukan tentang Persetujuan AMDAL /UKL/UPL An. PT PSL serta dokumen /Buku AMDAL/RKL/RPL; 6. Terdapat Akte Perubahan (Terakhir) nomor: 09 tanggal 05 April 2017 dari Kantor Notaris Hannywati Gunawan, SH di Jakarta dengan Pengesahan Badan Hukum No. AHU-AH.01.03-0124805 tanggal 06 April 2017, dimana **terdapat perubahan Susunan Pengurus Perusahaan** sebagai berikut : • Presiden Komisaris : Gandi Sulistyanto Soeherman • Komisaris : Laks. TNI (Purn) Dr. Marsetio • Komisaris : Dr. H. Darmono, S.H, MM • Presiden Direktur : Ir. Fuganto Widjaya • Wakil Presiden Direktur : Bambang Heruawan Haliman • Direktur : Edy Santoso, S.H,M.Hum • Direktur : Paulus Swasono Satyo Nugroho 7. NPWP PT. Berau Coal Nomor: 01.060.124.3-091.000 Alamat: Sinarmas MSIG Tower LT. 8&9 Jl. Jenderal Sudirman Kav.21. RT.012 RW 001, Karet Setiabudi, Jakarta Selatan-DKI Jakarta

			12920; sesuai dengan SPPKP Nomor: S-6PKP/WPJ.19/KP.0103/2018. Tanggal 9 April 2018 tentang PT Berau Coal sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 20 Maret 1983, dimana terdapat perubahan alamat perusahaan; 8. SKT Nomor: S-31 KT/WPJ.19/KP.0103/2015. Tanggal terdaftar: 4 Oktober 1983; 9. TDP Nomor: 17.04.1.05.00022 atas Kantor Cabang PT Berau Coal dibuat oleh Pemerintahan Kab Berau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan alamat Jl. Pemuda No.40 Kel. Tanjung Redeb, Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau dengan NPWP Kantor Cabang : 01.060.124.3-727.001.
14	**1.4.1.c** Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Izin usaha (PKP2B) atas nama PT Berau Coal sama dengan pemegang IPK pada APL Tahun 2018/2019 atas areal pertambangan batubara 2.676,95 Ha, sehingga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
15	**1.4.1.d** IPK pada APL	**M**	Terkait dokumen Rencana IPK (survey potensi) Tahun 2018/2019 seluas 2.676,95 Ha pada verifier 1.4.1.a maka pihak PT Berau Coal telah mendapatkan SK. Persetujuan IPK dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/309/IPK/DPMPTSP/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 atas nama PT Berau Coal di areal Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Berau Coal di Kabupaten Berau dan pada SK. IPK tersebut terlampir Peta IPK Tahun 2018/2019 Skala 1 : 100.000. Pada periode penilikan (Maret s/d Oktober 2018) tidak terdapat perubahan dokumen SK, IPK dan lampiran Peta IPK Tahun 2018/2019 yang disetujui oleh Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Kalimantan Timur, seperti diatas. Lokasi IPK PT Berau Coal berada pada areal APL, sesuai Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.718/Menhut-II/2014.
16	**1.4.1.e** Peta lampiran IPK	**M**	Terkait dengan verifier 1.4.1.d (seperti diatas), maka berdasarkan observasi lapangan diketahui bahwa lokasi IPK atas nama PKP2B PT Berau Coal seluas 2.676,95 Ha sesuai dengan lampiran Peta lokasi PKP2B PT Berau Coal dan pada penilikan tidak ada perubahan. Hasil pengecekan di lapangan (site Binungan) terdapat patok 30

			dengan koordinat N 01^0 55' 55,8" E 117^0 18' 27,9" terdapat patok cat merah dan pita sepanjang jalur batas.

6. Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17	**1.4.2.a** IPK pada APL	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh PT Berau Coal adalah IPK Pada APL pertambangan batubara bukan Pada Areal yang dilepas untuk pemukiman transmigrasi
18	**1.4.2.b** Peta Lampiran IPK	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh PT Berau Coal adalah IPK Pada APL pertambangan batubara bukan Pada Areal yang dilepas untuk pemukiman transmigrasi

B. PRINSIP 2 : Kesesuaian dengan sistem dan prosedure penebangan serta pengangkutan kayu
KRITERIA 2.1 : Kesesuaian rencana dan implementasi IPK/ILS

7. Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19	**2.1.1** Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	**M**	Terdapat dokumen Bagan Kerja/ Rencana Penebangan IPK Tahun 2018/2019 PT Berau Coal pada areal seluas ± 2.676,95 Hektar di Site Lati, Site Binungan dan Site Sambarata yang sudah mendapat pengesahan dari Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur. BKT disahkan pada tanggal 14 Februari 2018 dengan Nomor: 503/309/IPK/DPMPTSP/II/2018 dan pada periode penilikan **tidak ada perubahan.** Dokumen Rencana tebang IPK Tahun 2018/2019 seluas 2.676,95 Ha terdiri dari : 1. PT. Berau Coal telah memiliki dokumen Laporan Pelaksanaan Timber Cruising 100% di areal PKP2B PT Berau Coal Site lati, Sambarata dan Binungan pada areal yang akan dimanfaatkan kayunya dan lokasi sesuai dengan izin IPK yang dimiliki pada areal seluas ± 2.676,95 Ha di areal APL pertambangan PT Berau Coal

Kab. Berau – Prov. Kaltim

2. Terdapat BAP Timber Cruising tanggal 29 Januari 2017 ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut (beserta Tim Pelaksananya)
3. Terdapat Ganis PHPL Canhut a/n Satria Yudha Priyanto, M.P. Reg. 02364-11/CANHUT/XX/2017 berlaku sampai dengan 8 September 2020
4. Terdapat Pakta Integritas yang menerangkan kebenaran pelaksanaan timber cruising yang ditandatangani oleh License & Corp Comm Div. Head PT Berau Coal tanggal 5 Februari 2018
5. Lokasi IPK sesuai dengan izin perpanjangan yang diberikan pada areal APL pertambangan batubara PT Berau Coal.
6. Terdapat SI PNBP atas kewajiban 25 % DR dari rencana IPK sejumlah US$ 132.254,63 sesuai dengan kode billing No 820180207598381 tanggal 07 Februari 2018 dan telah dibayar tanggal 08 Februari 2018 dengan NTB 000000641357 dan NTPN No. B2D002DJ4P4CUSO9 melalui Bank BNI
7. Terdapat SI PNBP atas kewajiban 25 % PSDH dari rencana IPK sejumlah Rp 594.648.500 sesuai dengan kode billing No 820180207598027 tanggal 07 Februari 2018 dan telah dibayar tanggal 08 Februari 2018 dengan NTB 000000675736 dan NTPN No. 5F9E808MVU63SQQH melalui Bank Sinar Mas
8. Rekapitulasi hasil cruising 100 % areal 2.676,95 Ha sebagai berikut :

No	Kelompok Jenis	Volume per Kelas Diameter (M3)						Total	
		10 - 29 Cm		30 - 49 Cm		50 Cm Up			
		Btg	Vol.	Btg	Vol.	Btg	Vol.	Btg	Vol.
I	Ky. Indah	469	84.95	351	240.88	88	225.38	908	551.21
II	Meranti	9,390	1,897.86	10,236	8,006.64	5,253	17,762.02	24,879	27,666.52
III	Rimba Campuran	38,313	6,305.12	14,490	9,175.32	2,235	5,950.64	55,038	21,431.08
	Total I+II+III	**48,172**	**8,287.93**	**25,077**	**17,422.84**	**7,576**	**23,938.04**	**80,825**	**49,648.81**

8. Indikator 2.1.2. : Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya

<table>
<tr><th>No.</th><th>Nomor & Judul Verifier</th><th>Nilai</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>20</td><td>2.1.2.a
Dokumen potensi tegakan pada areal kerja</td><td>M</td><td>Terkait dengan verifier 1.4.1.a maka diketahui bahwa potensi IPK pada APL PT Berau Coal Tahun 2018/2019 seluas 2.676,95 Ha berasal dari Laporan Hasil Cruising yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut dan kemudian rekapitulasinya menjadi bahan untuk penentuan target produksi kayu bulat diameter 10 cm yaitu sebanyak 80.825 pohon dengan volume 34.754,17 M3, dimana perhitungan target produksi tersebut diperoleh dari hasil perkalian Rekapitulasi LHC dengan Faktor Eksploitasi (0,7) dan secara rinci target IPK sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">Kelompok Jenis kayu</th><th rowspan="2">Target</th><th colspan="4">Kelas Diameter (cm)</th></tr>
<tr><th>10-29</th><th>30-49</th><th>50-Up</th><th>Total</th></tr>
<tr><td>Meranti</td><td>N</td><td>9.390</td><td>10.236</td><td>5.253</td><td>24.879</td></tr>
<tr><td></td><td>V</td><td>1.328,50</td><td>5.604,65</td><td>12.433,41</td><td>19.366,56</td></tr>
<tr><td>Rimba Campuran</td><td>N</td><td>38.313</td><td>14.490</td><td>2.235</td><td>55.038</td></tr>
<tr><td></td><td>V</td><td>4.413,58</td><td>6.422,72</td><td>4.165,45</td><td>15.001,76</td></tr>
<tr><td>Kayu Indah</td><td>N</td><td>469</td><td>351</td><td>86</td><td>886</td></tr>
<tr><td></td><td>V</td><td>59,47</td><td>168,62</td><td>152,97</td><td>375,43</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>N</td><td>48.172</td><td>25.077</td><td>7.576</td><td>80.038</td></tr>
<tr><td></td><td>V</td><td>5.801,55</td><td>12.195,99</td><td>16.756,63</td><td>34.754,17</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>21</td><td>2.1.2.b
Dokumen produksi kayu (LHP)</td><td>M</td><td>Pada periode Penilikan (Maret s/d Oktober 2018) Terdapat 2 (dua) Ganis PKB-R yang dimiliki oleh PT Berau Coal yaitu :
1. Dedy Kustiono, S.Hut, Nomor Register 00195-11/PKB-R/XX/2011 (berlaku s/d 07 Maret 2020) dan sesuai SK. General Manager Nomor :039/BC/LCC-YNP/IV/2018 tanggal 04 April 2018 diangkat sebagai P2LHP untuk IPK Tahun 2018/2019 seluas 2.676,95 Ha sesuai SK. IPK Nomor : 503/309/IPK/DPMPTSP/II/2018 tanggal 14 Februari 2018;
2. Rohmadi, Nomor Register 00077-13/PKB-R/XX/2010 (berlaku s/d 28 Juli 2019) dan sesuai SK. General Manager Nomor :040/BC/LCC-YNP/IV/2018 tanggal 04 April 2018 diangkat sebagai P2SKSHHK untuk IPK Tahun 2018/2019 seluas 2.676,95 Ha sesuai SK. IPK Nomor : 503/309/IPK/DPMPTSP/II/2018 tanggal 14 Februari 2018;
Pada periode audit penilikan (Maret s/d Oktober 2018) terdapat 6 (enam) dokumen LHP yang dibuat oleh P2LHP yang sudah ditetapkan (Sdr. Dedy Kustiono) dan rincian LHP tersebut sebagai berikut :</td></tr>
</table>

No.LHP	Bulan	Volume (M3)	Site
05/LMO	Juni 2018	384,37	Lati
07/BMO	Agts 2018	2.582,16	Binungan
08/SMO	Agts 2018	1.648,19	Sambarata
09/LMO	Agts 2018	403,91	Lati
10/BMO	Sept 2018	4.281,61	Binungan
12/BMO	Okt 2018	3.603,03	Binungan
Total		**12.903,27**	

KRITERIA 2.2 : Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu.

9. Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
22	**2.2.1.a** Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	**M**	Pada periode audit penilikan maka diketahui terdapat dokumen SPP SI PNBP atas LHP kayu IPK Tahun 2018/2019 sebanyak 12.903,27 M3 dari bulan Juni s/d Oktober 2018, dan sesuai dengan rekapitulasi SPP SI PNBP (DR dan PSDH) maka jumlah tagihan DR dan PSDH yang disampaikan kepada PT Berau Coal sebagai berikut : 1. SPP DR sebesar US $ 201.072,40 2. SPP PSDH sebesar Rp. 962.213.090,00
23	**2.2.1.b** Bukti Setor DR dan/atau PSDH	**M**	Seluruh SPP SI PNBP-SIMPONI atas tagihan PSDH dan DR terhadap LHP kayu IPK dari bulan Juni s/d Oktober 2018 telah dibayar sesuai dengan SPP dengan transfer melalui Bank Sinarmas dan Bank Negara Indonesia. Jumlah pembayaran PSDH dan DR masing-masing sebagai berikut : 1. PSDH sebesar Rp. 962.213.090,00; 2. DR sebesar US $ 201.072,40
24	**2.2.1.c** Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	**M**	Sesuai dengan pengecekan seluruh dokumen SPP PSDH dan DR (SI PNBP-SIMPONI) seperti verifier 2.2.1.a dan 2.2.1.b maka diketahui tarif DR dan PSDH yang diberlakukan adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Reboisasi (DR) tanggal 14 Februari 2014 2. Peraturan Menperindag Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk penghitungan PSDH 3. Peraturan Menperindag Nomor 22/M-DAG/PER/4/2012, tentang perubahan atas Permendag Nomor1 2/M-DAG/PER/3/2012

			tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk penghitungan PSDH tanggal 24 April 2012 4. Permenhut Nomor P.68/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Ganti Rugi Tegakan, dan Pengganti Nilai Tegakan

10. Indikator 2.2.2. : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
25	**2.2.2.a** FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen angkutan FAKB/SHSHHK untuk KBK sudah tidak diberlakukan lagi
26	**2.2.2.b** SKSKB dan DKB untuk KB	**M**	Pada periode penilikan terdapat penerbitan dokumen SKSHHK oleh Petugas penerbit SKSHHK yaitu Sdr. Rohmadi dengan Nomor Register 00077-13/PKB-R/XX/2010 yang berlaku s/d 28 Juli 2019 dan sesuai SK. General Manager Nomor :040/BC/LCC-YNP/IV/2018 tanggal 04 April 2018 diangkat sebagai P2SKSHHK untuk IPK Tahun 2018/2019 seluas 2.676,95 Ha (SK. IPK Nomor : 503/309/IPK/DPMPTSP/II/2018 tanggal 14 Februari 2018) Jumah dokumen untuk mengangkut kayu IPK dari TPn/TPK Hutan ke TPK Antara dari bulan Agustus s/d September 2018 sebanyak 192 set yang terdiri dari : 1. TPn/TPK Hutan Binungan ke TPK Antara Labanan sebanyak 152 set SKSHHK yang mengangkut kayu sebanyak 1.944 batang dengan volume 6.537,04 M3; 2. TPn/TPK Hutan Lati ke TPK Antara Sembakungan sebanyak 35 set SKSHHK yang mengangkut kayu sebanyak 756 batang dengan volume 691,60 M3; 3. TPK Antara Labanan ke Industri sebanyak 1 set SKSHHK yang mengangkut kayu sebanyak 180 batang dengan volume 822,93 M3; 4. TPK Antara Sembakungan ke Industri sebanyak 4 set SKSHHK yang mengangkut kayu sebanyak 85 batang dengan volume

			71,04 M3.

KRITERIA 2.3 : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

11. Indikator 2.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27	**2.3.1** Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan	**M**	Pada periode penilikan pada IPK ditemukan dokumen SKSHHK yang digunakan untuk mengangkut kayu IPK yang diterbitkan oleh P2SKSHHK (Sdr. Rohmadi) sebanyak 192 set dimana pada dokumen SKSHHK tersebut terdapat Tanda V-Legal dengan Nomor S-LK : **344.SLK.010-IDN**. Selain itu hasil pengecekan stok kayu di TPK Antara Binungan ditemukan ID Barcode pada setiap kayu IPK tahun 2018/2019 yang terdapat Tanda V-Legal dan nomor S-LK (**344.SLK.010-IDN**).

C. PRINSIP 3 : Pemenuhan terhadap peraturan tenagakerjaan bagi IPK

KRITERIA 3.1 : Pemenuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

12. Indikator 3.1.1. : Prosedure dan implementasi K3

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28	**3.1.1.a** Pedoman /prosedure K3	**M**	Pada periode Penilikan diketahui terdapat dokumen procedure K3 PT Berau Coal yang tertuang di 2 dokumen procedure dengan nomor dokumen dan tanggal efektif berlaku sebagai berikut : 1. Nomor dokumen : P-OHS-10 (Edisi 2 Revisi 3) tanggal efektif 20 April 2016 tentang Prosedur Pelaporan dan Investigasi Insiden Serta Pelanggaran Golden Rules dengan Siklus Tinjau Ulang Dokumen selama 4 tahun; dokumen disiapkan oleh Suparli (Specialist Investigasi), diperiksa oleh Aloisius Paerong (OHS Manager) dan Hamdan (GM HSE) dan disetujui Gatot B. Kuncahyo (Kepala Teknik Tambang); 2. Nomor dokumen : P-ERG-02 (Edisi 1 Revisi 3) tanggal efektif 08 Agustus 2017 tentang Prosedure Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat dengan Siklus Tinjau Ulang Dokumen selama 4 tahun ; dokumen disiapkan oleh Andi Henry Achmad (ER & OHSE Training Dpt. Head, diperiksa oleh Hamdan Div. Head dan

			disetujui oleh Gatot B. Kuncahyo (Kepala Teknik Tambang). Sesuai dengan Struktur Organisasi PT Berau Coal yang di setujui oleh HRGS Direktur dan Presiden Direktur serta berlaku efektif 12 Oktober 2017 maka diketahui bahwa personel bertanggung jawab dalam implementasi K3 yaitu Manager OHS (Occupvation, Health & Safety) yaitu Sdr. **Saridi**
29	**3.1.1.b** Ketersediaan peralatan K3	**M**	Pada periode penilikan tersedia peralatan K3 sesuai ketetuan dan berfungsi baik yaitu sebagai berikut : 1. PT. Berau Coal sudah menyediakan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR, perlatan P3K, da Alat Pelindung Diri (APD) yang jumlahnya lengakap serta berfungsi dengan baik. 2. Pada area perkantoran, sudah tersedia jalur evakuasi disertai titik kumpul di tempat terbuka dan luas. 3. K3 sudah diimplementasikan lengkap terhadap seluruh unit pekerjaan, diantaranya : penggunaan APD bagi seluruh karyawan dan pengunjung (tamu), pemasangan rambu-rambu peringatan bahaya, recording kecelakaan kerja, penerapan sanksi, dan lain lain; 4. Poliklinik tersedia pada setiap site dengan penyediaan peralatan dan obat-obatan serta dokter dan petugas medis yang standby
30	**3.1.1.c** Catatan kecelakaan kerja	**M**	Pada periode Penilikan diketahui bahwa tersedia laporan kecelakaan kerja PT Berau Coal dari Januari s/d September 2018 yang dibuat oleh HSE Manager dan diketahui bahwa pada periode Januari s/d September 2018 tidak terjadi kecelakaan kerja yang berakibat major/minor/fatality di lapangan. Berdasarkan observasi lapanagan didapatkan upaya PT Berau Coal untuk menekan tingkat kecelakaan kerja di lapangan dengan memasang spanduk yang berisi himbauan untuk selalu memperhatikan Keselamatan Kerja kepada

KRITERIA 3.2 : Pemenuhan standar umur tenaga kerja

13. Indikator 3.2.1. : Tidak memepekerjakan pekerja dibawah umur (diluar ketentuan)

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
31	**3.2.1** Pekerja yang masih dibawah umur	**M**	Pada periode Peinilikan terdapat daftar nama karyawan yang terlibat di kegiatan IPK APL PT Berau Coal dengan jumlah 17 orang dan diketahui bahwa karyawan termuda yaitu **Aldo Surya Syahputra** (tempat tanggal lahir : Samarinda, 17 Januari 1999) sebagai Scaller Technician yang masuk kerja di PT Berau Coal tanggal 24 Oktober 2017 saat berumur berumur 18 tahun 10 bulan

Keterangan :
M : Memenuhi
N/A : Not Applicable
TM : Tidak Memenuhi

Samarinda, 24 Oktober 2018
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur